

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal penting dalam menggerakkan suatu bangsa. Di antara tujuan utama pembangunan adalah untuk mengatasi kemiskinan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang besar dalam bentuk kebijakan *fiscal* melalui APBN dan APBD. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun.

Struktur APBD pada komponen belanja daerah, belanja modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sifat belanja modal sebagai modal/pondasi untuk meningkatkan pembangunan sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan Sejak tahun 1999, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar (Online et al., 2022).

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar dan penting dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi yang telah terjadi di Negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia (Kurniawan, 2018). Ditengah kepadatan penduduk Indonesia tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia masih tergolong tinggi baik di perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural.

Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional, mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. (Triono & Warsita, 2019). Kondisi kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tugas pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangannya karena sangat menghambat perkembangan pembangunan di Indonesia juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing kota maupun kabupaten, khususnya kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Kondisi kemiskinan kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan masih

cukup besar, hal ini dipengaruhi karena sulitnya mencari pekerjaan, masih terbatasnya anggaran dan lapangan pekerjaan.

Kondisi kemiskinan Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan yang masih tergolong tinggi merupakan suatu masalah yang perlu diatasi dengan berbagai macam upaya, kinerja dan kerjasama baik antar pemerintah pusat dan daerah ataupun antar pemerintah dan masyarakat yang ada. Salah satu faktor penunjang yang mempengaruhi adanya penurunan kemiskinan adalah tingkat Indeks pembangunan manusia daerah. Salah satu dampak dari meningkatnya Indeks pembangunan manusia diharapkan mampu mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin (Putra, 2020).

Tabel I
Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap
Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019– 2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (X1) (%)	Tingkat Pengangguran (X2) (%)	Kemiskinan (Y) (%)
2019	70.02	4.53	12.71
2020	70.01	5.51	12.66
2021	70.24	4.98	12.84
2022	70.90	4.63	11.95
2023	71.62	4.11	11.78

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik pada tabel 1, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Secara teori seharusnya hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan adalah negative atau tidak searah, artinya ketika IPM meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Namun kenyataannya di Provinsi

Sumatera Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terjadi hubungan positif (searah) antara IPM dengan tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2020 ketika IPM menurun dari 70,02% menjadi 70,01% juga disertai penurunan tingkat kemiskinan dari 12,71% di tahun 2019 menjadi 12,66% di tahun 2020. Begitu pula ketika IPM meningkat di tahun 2021 sebesar 70,24% diikuti peningkatan kemiskinan sebesar 12,84% di tahun 2021. Ketika tahun 2022 IPM mengalami peningkatan kembali sebesar 70,90% namun kemiskinan mengalami penurunan sebesar 11,95% pada tahun 2022. Dan di tahun 2023 IPM mengalami peningkatan kembali sebesar 71,62% dan kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 11,78% pada tahun 2023. Rendahnya indeks pembangunan manusia menunjukkan masih terjadinya kekurangan terkait dalam dimensi kesehatan, pendidikan serta pengeluaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data tersebut tentu mengindikasikan adanya sebuah masalah bahwa kebijakan yang dilakukan belum mampu konsisten dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini tentu menjadi perhatian, faktor apa saja yang mungkin dapat menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah tersebut tinggi dan berfluktuasi dari tahun ke tahun khususnya di Provinsi Sumatera Selatan . Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang rendah. Masalah Pokok dalam perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yakni kemiskinan membuat proses pembangunan menjadi terhambat, selain berupaya mengurangi angka kemiskinan pemerintah juga perlu meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia yang ada di kabupaten/kota

provinsi Sumatera Selatan, karena dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dapat membantu dalam mempercepat proses pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah (Sambur et al., 2023).

Dikarenakan IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup layak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2023".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat

Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2023 baik secara parsial maupun simultan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2023 baik secara parsial maupun simultan.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut:

4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Para Akademik

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengetahuan khususnya di bidang akademik tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia.

b. Bagi Para peneliti

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan pengetahuan daan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berniat melakukan penelitian tentang pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan.

c. Bagi dunia pendidikan

Diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi tenaga pendidik diruang lingkup universitas baturaja dan perpustakaan untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan bukti empiris tentang pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi sumatera selatan.

4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Sub Pemerintahan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi sub Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi sumatera selatan

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis.